

**POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Hartanti Amanda Arsyad
NPP.32.0652

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : amandarsyad@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Dra.Hj. Meltarini M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The 2024 legislative election in Kupang City once again highlighted the prevalence of identity politics, particularly those based on ethnicity and clan affiliation. Kupang, as a multi-ethnic city, provides fertile ground for identity politics due to the tendency of voters to support legislative candidates from the same ethnic or clan background. This phenomenon indicates that political preferences among the populace have not fully shifted towards rational considerations such as candidate quality and vision, but are still strongly influenced by primordial ties. **Purpose :** This study aims to analyze how identity politics took place during the 2024 DPRD (Regional House of Representatives) election in Kupang City and to identify the factors contributing to the emergence of such practices. **Method :** This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results :** The study found that identity politics played a significant role in the election of DPRD members in Kupang City. Voters tended to favor candidates who shared their ethnic or clan identity, especially those from dominant ethnic groups such as Rote, Sabu, and Timor. Candidates actively leveraged these identities in their campaign strategies. Statistical data also revealed that the electability of candidates from certain clans was considerably higher compared to those from minority ethnic groups. **Conclusion :** Identity politics remains a dominant force in the local democratic process in Kupang City. This reflects the continued influence of emotional bonds and shared ethnic identity on political preferences. If not properly managed, identity politics has the potential to trigger polarization and hinder inclusive, program-based political development. Therefore, political education efforts and stricter campaign regulations are needed to curb the practice of exclusive identity politics.

Keywords: Identity politics, ethnicity, clan, election, Kupang City DPRD.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Kupang memperlihatkan kembali maraknya praktik politik identitas, terutama berbasis etnis dan marga. Kota Kupang yang merupakan kota multietnis menjadi ladang subur bagi praktik politik identitas karena adanya kecenderungan pemilih memilih calon legislatif yang berasal dari etnis atau marga yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat belum sepenuhnya beralih ke pertimbangan rasional seperti kualitas dan visi calon, melainkan masih terjebak pada ikatan primordial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berlangsung dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang tahun

2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya praktik politik identitas tersebut. **Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Penelitian menemukan bahwa politik identitas memainkan peran signifikan dalam pemilihan anggota DPRD di Kota Kupang. Pemilih cenderung memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan etnis atau marga, terutama dari kelompok etnis dominan seperti Rote, Sabu, dan Timor. Para kandidat secara aktif memanfaatkan **identitas tersebut dalam strategi** kampanye mereka. Data statistik juga menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan calon dari marga tertentu jauh lebih tinggi dibandingkan etnis minoritas. **Kesimpulan** : Politik identitas masih menjadi kekuatan yang dominan dalam proses demokrasi lokal di Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh ikatan emosional dan kesamaan identitas etnis. Jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas berpotensi memicu polarisasi dan menghambat pembangunan politik yang inklusif dan berbasis program. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi politik dan regulasi kampanye yang lebih ketat untuk menekan praktik politik identitas yang eksklusif. **Kata Kunci**: Politik identitas, etnis, marga, pemilu, DPRD Kota Kupang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi (Athahirah, 2022). Pemilihan umum merupakan manifestasi paling nyata dari sistem demokrasi, di mana rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan arah kepemimpinan politik dan kebijakan publik melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, langsung, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana politik formal, tetapi juga menjadi cerminan dari kompleksitas sosial dan budaya masyarakat yang majemuk. Dalam kenyataannya, demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah muncul dan menguatnya praktik politik identitas. Politik identitas adalah strategi yang digunakan oleh aktor-aktor politik untuk memperoleh dukungan melalui penggalangan identitas kelompok, seperti etnis, agama, atau marga. Fenomena ini semakin terlihat dalam setiap momentum elektoral, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan realitas multietnis Indonesia. Kota ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Rote, Sabu, Timor, Flores, Sumba, serta etnis pendatang seperti Bugis dan Jawa. Keragaman ini, meskipun menjadi kekayaan budaya, juga membuka ruang bagi munculnya praktik politik identitas yang eksklusif. Pemerintah didirikan dengan tujuan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat dapat hidup secara wajar. Tujuan utama pemerintahan adalah untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan inovasi mereka untuk mencapai kemajuan bersama (Labolo, 2014).

Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Kupang menjadi salah satu contoh konkret dari fenomena tersebut. Berdasarkan data hasil rekapitulasi pemilu, diketahui bahwa tingkat keterpilihan calon legislatif (caleg) sangat dipengaruhi oleh afiliasi etnis atau marga. Dari total 177 caleg yang bertarung dalam pemilu tersebut, hanya 40 orang yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kupang. Adapun rincian keterpilihan berdasarkan etnis atau marga menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok:

Etnis/Marga	Jumlah Caleg	Jumlah Terpilih	Persentase Keterpilihan
Rote	42	14	33,3%
Sabu	35	9	25,7%
Timor	37	8	21,6%
Pendatang (Bugis, Jawa, dll)	21	5	23,8%
Flores	27	4	14,8%
Sumba	15	0	0%

Data di atas menunjukkan bahwa kelompok etnis lokal yang secara historis memiliki keterikatan budaya kuat, seperti Rote, Sabu, dan Timor, mendominasi perolehan kursi DPRD. Sementara itu, kelompok minoritas seperti Flores dan Sumba memiliki representasi yang jauh lebih kecil, bahkan nihil dalam kasus etnis Sumba. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa preferensi pemilih di Kota Kupang masih sangat dipengaruhi oleh kesamaan identitas etnis atau marga, bukan semata-mata oleh kualitas, visi, atau program kerja calon legislatif. Fenomena ini mencerminkan bahwa politik identitas masih menjadi strategi yang efektif dan digunakan secara sistematis oleh para kandidat dan tim suksesnya. Dalam berbagai kampanye, tidak jarang simbol-simbol identitas seperti nama marga, daerah asal, hingga ritual budaya dijadikan alat untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Strategi ini memang mampu meningkatkan simpati dan loyalitas, namun pada saat yang sama berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti rasionalitas pemilih dan kompetisi berbasis gagasan. Partai politik dipandang sebagai pihak yang menangani identitas melalui dua dimensi: eksklusivitas dan inklusi, serta kultural dan material. Istilah-istilah ini digunakan sebagai pengganti 'kanan' dan 'kiri' (Crouch C, 2025).

Praktik politik identitas yang tidak dikelola secara bijak berisiko menimbulkan polarisasi sosial dan eksklusivisme politik. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Lebih jauh, hal ini juga dapat menghambat proses pembangunan politik dan pemerintahan yang meritokratis, di mana kualitas individu seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam pemilihan pejabat publik. Berdasarkan kenyataan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana politik identitas beroperasi dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang tahun 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong menguatnya politik identitas, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi edukasi politik yang efektif, serta mendorong perumusan kebijakan yang dapat membatasi praktik politik identitas yang bersifat eksklusif dan diskriminatif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian tentang politik identitas umumnya berfokus pada pemilihan kepala daerah atau isu agama dan suku. Namun, masih jarang yang mengkaji politik identitas berbasis etnis dan marga dalam pemilihan legislatif, khususnya di daerah multietnis seperti Kota Kupang. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan data perbandingan antara jumlah calon dan keterpilihan berdasarkan marga, padahal ini penting untuk melihat pengaruh politik identitas dalam hasil pemilu. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana politik identitas terjadi dalam Pemilu DPRD 2024 di Kota Kupang dan apa faktor yang mendorongnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai politik identitas telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dalam konteks pemilu maupun pilkada di Indonesia. Fenomena ini umumnya dikaji dalam lingkup pemilihan kepala daerah, dengan fokus pada pengaruh identitas etnis, agama, dan marga terhadap preferensi politik masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam penelitian ini karena memberikan gambaran tentang bagaimana politik identitas beroperasi di berbagai daerah dengan latar belakang sosial yang berbeda. (Hasanudin, Samad, & Maya, 2023) dalam penelitiannya di Kota Kendari menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif untuk mencegah maraknya politik identitas dalam pilkada. Mereka menemukan bahwa faktor kesukuan merupakan pemicu utama munculnya praktik politik identitas di wilayah tersebut, dan merekomendasikan adanya peran aktif dari pemangku kepentingan untuk mengurangi dominasi identitas dalam kontestasi politik. (Manik, 2023) melakukan penelitian tentang penggunaan marga Bancin dalam pemilihan kepala desa di Kuta Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan kesamaan marga. Hal ini digunakan oleh para calon untuk memobilisasi dukungan politik, sehingga politik identitas menjadi alat utama dalam kampanye.

Penelitian lain oleh (Carlos Dwi Putra Marbun, 2022) di Desa Siraja Hutagalung, Tapanuli Utara, juga memperkuat temuan sebelumnya. Ia menemukan bahwa politik identitas berbasis etnis dan marga memiliki peran penting dalam proses pemilihan kepala desa, di mana masyarakat lebih cenderung memilih kandidat yang berasal dari marga yang sama. (M.San Opara, 2023) dalam kajiannya terhadap Pilgub Jambi tahun 2020 menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan calon sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas seperti hubungan darah, suku, dan paguyuban etnis. Hal ini memperlihatkan bahwa politik identitas tidak hanya terjadi di daerah minoritas, tetapi juga di wilayah dengan struktur sosial yang kompleks. Sementara itu, (Andi Prima Sahala, 2018) dalam studi kasus Pilgub DKI Jakarta 2017 menyoroti penggunaan isu agama dan etnis oleh elit politik untuk mempengaruhi opini publik. Dalam konteks kota metropolitan seperti Jakarta, isu identitas digunakan secara sistematis untuk membentuk persepsi dan menentukan arah dukungan politik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian politik identitas pada tingkat pemilu legislatif daerah, khususnya di wilayah multietnis seperti Kota Kupang. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada politik identitas dalam pemilihan kepala daerah atau dalam konteks nasional, serta lebih dominan membahas isu-isu berbasis agama dan suku secara umum. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menyoroti penggunaan identitas marga dan etnis sebagai strategi politik dalam pemilihan anggota DPRD, yang masih jarang dikaji secara mendalam. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif komparatif, yaitu dengan membandingkan jumlah calon legislatif berdasarkan etnis/marga dan tingkat keterpilihan mereka. Hal ini memberikan gambaran empiris yang lebih konkret tentang bagaimana preferensi politik masyarakat dibentuk oleh ikatan identitas kultural.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori politik identitas Pierre van den Berghe secara utuh, mencakup tiga perspektif: primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme, yang diaplikasikan secara kontekstual dalam realitas politik lokal Kota Kupang. Pendekatan teoritis yang komprehensif ini menjadi nilai tambah yang memperkuat analisis dan memperkaya literatur tentang dinamika politik identitas di tingkat lokal (Pierre L. Van Den Bergh, 1981). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman akademik tentang politik identitas dalam pemilu legislatif, tetapi juga memberikan kontribusi

praktis bagi pengembangan strategi edukasi politik, regulasi kampanye, dan penguatan demokrasi inklusif di daerah multietnis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena politik identitas yang terjadi dalam konteks pemilihan anggota DPRD Kota Kupang pada tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana praktik politik identitas, yang ditandai dengan penggunaan latar belakang etnis dan marga oleh para calon legislatif dan tim sukses, memengaruhi preferensi dan perilaku pemilih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya politik identitas dalam proses pemilu tersebut, baik dari sisi budaya, sosial, maupun strategi politik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika politik lokal yang sarat dengan muatan identitas, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik di tingkat daerah.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena politik identitas dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang tahun 2024 (Ismail Nurdin & Sri Hartati, 2019). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai perilaku, persepsi, serta motivasi para aktor politik dan pemilih dalam menggunakan atau merespons identitas etnis dan marga dalam proses pemilu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dianggap relevan, seperti calon legislatif, tim sukses, pemilih, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, yang menjadi lokasi utama penelitian karena memiliki keragaman etnis dan marga yang signifikan, serta menunjukkan indikasi kuat terjadinya politik identitas dalam pemilu lokal. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika politik identitas yang terjadi dalam konteks lokal di Nusa Tenggara Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Identitas Pada Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Kupang.

3.1.1. Primordialisme

Pada dimensi ini, politik identitas terlihat dari adanya hubungan kekerabatan dan ikatan emosional yang kuat antara pemilih dan calon legislatif berdasarkan kesamaan etnis atau marga. Sebagian besar masyarakat Kota Kupang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam urusan politik. Data di lapangan menunjukkan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari marga atau etnis yang sama, karena dianggap lebih mampu mewakili kepentingan kelompoknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat alamiah dan diwariskan, sehingga memengaruhi secara signifikan pilihan politik masyarakat. "primordialisme politik" merupakan fenomena kontestasi politik lokal. Tujuan primordialisme politik adalah sebagai instrumen mobilisasi politik yang efisien dengan cara menghemat waktu, tenaga, dan pikiran yang hanya membangkitkan "kesadaran sosiologis" pemilih. Primordialisme politik tidak menuntut adanya ide-ide aktor politik untuk

memperoleh dukungan, tetapi memanfaatkan aspek primordial yang melekat pada diri setiap pemilih. primordialisme mungkin lebih baik dipandang sebagai unsur dalam nasionalisme daripada sebagai penjelasan tentang nasionalism(Coakley, 2018).

3.1.1.2. Dukungan terhadap kandidat melalui ikatan kekeluargaan atau kekerabatan (hubungan darah seperti marga).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, mayoritas pemilih di Kota Kupang lebih memilih kandidat yang berasal dari marga atau etnis yang sama. Hal ini diperkuat dengan data keterpilihan anggota DPRD Kota Kupang hasil Pemilu 2024 yang menunjukkan dominasi etnis mayoritas seperti Rote, Sabu, dan Timor. Dari 42 caleg etnis Rote, sebanyak 14 orang berhasil terpilih (33,3%). Untuk etnis Sabu dari 35 caleg, sebanyak 9 orang terpilih (25,7%). Sedangkan dari etnis Timor, 8 dari 37 caleg berhasil mendapatkan kursi DPRD (21,6%). Di sisi lain, etnis Flores hanya memperoleh 4 dari 27 kursi (14,8%), dan etnis Sumba tidak mendapatkan kursi sama sekali meskipun mengajukan 15 calon (0%). Data ini menunjukkan bahwa keterpilihan sangat terkait dengan kekuatan ikatan kekeluargaan dan marga. Fenomena ini menegaskan bahwa banyak pemilih merasa memiliki tanggung jawab untuk memilih "orang sendiri" yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Dalam beberapa wawancara ditemukan ungkapan seperti "kalau bukan dari kita, siapa lagi yang perjuangkan kita" yang menandakan betapa kuatnya pengaruh relasi primordial dalam perilaku memilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang masih menjadikan hubungan kekeluargaan, kedekatan marga, atau kesamaan asal-usul etnis sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan politik. Pemilih merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung kandidat yang berasal dari marga atau suku yang sama, karena dianggap sebagai "perwakilan keluarga besar". Dalam wawancara dengan beberapa informan, ditemukan pernyataan seperti "kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan perjuangkan kita". Hal ini menandakan bahwa loyalitas politik dibentuk atas dasar hubungan primordial yang telah melekat secara turun-temurun.

3.1.2. Konstruksionis

Dalam perspektif konstruksionis, politik identitas dibentuk dan dibangun melalui proses sosial dan pengalaman kolektif masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa isu-isu identitas, seperti kesamaan marga dan asal daerah, dikonstruksi sedemikian rupa oleh tim sukses maupun calon legislatif untuk membangun citra dan kepercayaan di hadapan pemilih. Momentum politik, terutama menjelang hari pemungutan suara, dimanfaatkan untuk menegaskan kembali identitas kelompok dengan tujuan memperkuat loyalitas politik. Dalam banyak kasus, simbol-simbol etnis, nama marga, dan latar belakang budaya calon ditonjolkan dalam kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan jaringan relasi sosial. Menurut Manuel Castells dalam jurnal *Political Identity Conceptualization Of The Term* konstruksionis terdapat tiga bentuk yaitu identitas legitimasi, identitas perlawanan, dan identitas proyektif(Yatsenko, 2020).

3.1.2.1. Munculnya isu pemilih terhadap kandidat berdasarkan kesamaan (marga atau etnis, dan agama).

Dalam kampanye Pemilu 2024, sebagian besar calon legislatif menonjolkan kesamaan identitas budaya seperti marga dan suku. Simbol-simbol lokal digunakan secara luas, baik dalam media kampanye digital maupun dalam pertemuan tatap muka. Kandidat dari kelompok etnis mayoritas dianggap lebih merepresentasikan aspirasi masyarakat lokal, dan narasi ini diperkuat oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan keluarga besar. Dalam praktiknya, isu agama dan etnis dipolitisasi secara halus. Misalnya, seorang calon dari kelompok Kristen Protestan dan suku Rote memanfaatkan acara gereja sebagai wadah sosialisasi, dan dalam forum informal, identitas marga digunakan sebagai argumen legitimasi sosial. Diskusi di media sosial dan grup WhatsApp keluarga besar pun dipenuhi oleh ajakan untuk "mendukung calon dari suku kita" atau "memilih orang yang tahu adat kita". Strategi ini menciptakan persepsi luas bahwa kesamaan identitas adalah jaminan representasi

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar isu-isu yang diangkat selama kampanye sangat kental dengan unsur identitas, terutama dalam bentuk narasi kesamaan marga dan etnis. Kandidat yang berasal dari kelompok etnis mayoritas lebih mudah membangun basis pemilih karena dinilai mewakili kepentingan dan jati diri masyarakat setempat. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, narasi tersebut dibangun dalam percakapan informal, jaringan keluarga besar, dan komunitas adat.

3.1.2.2. Politik Identitas Menjadi Alat Dalam Memperoleh Suara (Momentum Politik).

Menjelang hari pencoblosan, sentimen identitas semakin diperkuat. Para kandidat memanfaatkan pertemuan keluarga besar, acara adat, dan momen keagamaan untuk mempertegas kedekatan mereka dengan masyarakat melalui bahasa dan simbol etnis. Dalam salah satu kasus yang diamati, seorang kandidat dari marga Manafe menggelar acara adat dan menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan pesan kampanye secara simbolik, seperti dengan menyisipkan pesan-pesan politik dalam doa atau sambutan adat. Momentum politik ini digunakan untuk membangkitkan kebanggaan etnis dan mendorong pemilih agar merasa memiliki tanggung jawab kolektif dalam memenangkan kandidat dari marga mereka. Dalam wawancara, seorang tokoh adat menyatakan bahwa "jika kita tidak dukung anak dari kita, nanti orang lain ambil semua jatah pembangunan". Ungkapan seperti ini memperlihatkan bagaimana politik identitas berperan sebagai sarana mobilisasi kolektif melalui sentimen persatuan etnis.

menjelang hari pemilihan dimanfaatkan oleh kandidat dan tim sukses untuk memperkuat sentimen identitas. Pendekatan dilakukan melalui forum-forum keluarga besar, pertemuan adat, dan kegiatan sosial keagamaan, di mana identitas marga dan kedekatan emosional ditekankan. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kesan bahwa "calon dari marga sendiri" layak dipilih karena memiliki ikatan sosial yang nyata dan dapat dipercaya.

3.1.3. Instrumentalis

Pada dimensi instrumentalis, politik identitas digunakan secara sadar dan strategis oleh aktor politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan dan memenangkan suara. Penelitian ini menunjukkan bahwa para calon legislatif dan tim kampanye secara aktif memanfaatkan identitas marga sebagai strategi kampanye, misalnya dengan membentuk kelompok pendukung berdasarkan ikatan etnis atau menggunakan narasi “putra daerah” untuk menarik simpati massa. Terdapat upaya manipulasi identitas secara halus dengan memainkan isu representasi dan kesamaan nasib sebagai alat mobilisasi politik. Selain itu, terbentuk pula solidaritas politik berbasis identitas yang mendorong terjadinya pengelompokan dan segmentasi pemilih, yang dalam praktiknya memperkuat politik eksklusif.

3.1.3.1. Politik Identitas Dalam Memobilisasi Dukungan Untuk Pasangan Calon (Manipulasi dan Mobilisasi Pendukung)

Manipulasi politik identitas terjadi ketika para kandidat dan tim sukses secara sadar membangun struktur kampanye berbasis marga. Dalam data lapangan, ditemukan bahwa tim sukses dibentuk berdasarkan struktur keluarga besar. Setiap kepala marga diberi tanggung jawab mengatur basis suara dari wilayah tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, dana kampanye disalurkan melalui tokoh adat dengan alasan sebagai "dukungan terhadap kegiatan budaya", padahal secara terselubung itu adalah bagian dari strategi mobilisasi suara. Dalam praktik kampanye, simbol-simbol budaya digunakan untuk memperkuat legitimasi kandidat. Misalnya, penggunaan pakaian adat khas suku tertentu, penggunaan bahasa lokal saat kampanye, serta penekanan pada asal-usul genealogis calon. Kampanye seperti ini cenderung mengesampingkan kualitas, integritas, dan program kerja kandidat, dan lebih fokus pada faktor kesamaan identitas.

Identitas marga dan etnis secara aktif digunakan dalam materi kampanye, baik secara langsung maupun tersirat. Misalnya, dalam baliho dan spanduk, beberapa calon menuliskan nama marganya secara mencolok atau mencantumkan simbol-simbol kultural tertentu yang mengindikasikan identitas etnisnya. Ini menjadi salah satu taktik yang sengaja digunakan untuk menarik perhatian pemilih dari kelompok etnis yang sama.

3.1.3.2. Politik Identitas Digunakan Sebagai Solidaritas Politik (Alat Memenangkan Suara)

Politik identitas dalam konteks Kota Kupang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan mobilisasi kolektif dalam kerangka solidaritas politik. Solidaritas ini muncul dari kesamaan identitas etnis dan marga yang digunakan oleh kandidat untuk menciptakan loyalitas politik di tingkat akar rumput. Dalam Pemilu 2024, para caleg membangun narasi bahwa keterwakilan politik dari kelompok marga tertentu adalah bagian dari perjuangan kolektif komunitas mereka di ranah pemerintahan lokal.

Data dari wawancara lapangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok etnis dominan seperti Rote, Sabu, dan Timor mengorganisasi basis dukungan melalui pertemuan adat dan aliansi marga. Setiap marga besar membentuk semacam tim kampanye internal yang bertugas mengkoordinasikan dan memastikan dukungan anggota keluarga besar kepada kandidat yang berasal dari marga tersebut. Misalnya, dalam komunitas Sabu dan Rote, pertemuan "famili besar" menjadi wadah utama penggalangan komitmen politik kolektif untuk "satu suara satu marga". Salah satu bentuk

konkret dari solidaritas politik ini adalah adanya pernyataan dari tokoh masyarakat dalam wawancara, "ini bukan soal siapa orangnya, tapi soal menjaga kehormatan marga kita di DPRD". Ungkapan ini menggambarkan bahwa pilihan politik bukan lagi semata-mata didasarkan pada kapasitas individu, tetapi pada kepentingan simbolik dan representatif marga di lembaga legislatif. Kandidat dijadikan simbol kehormatan kelompok yang wajib didukung oleh seluruh anggota komunitasnya.

Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan perolehan suara kandidat dari etnis mayoritas. Seperti yang ditunjukkan dalam data keterpilihan, kelompok Rote menyumbang 14 dari 42 caleg yang terpilih (33,3%), Sabu 9 dari 35 (25,7%), dan Timor 8 dari 37 (21,6%). Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya solidaritas berbasis identitas yang dijalin selama masa kampanye. Namun, penggunaan identitas sebagai alat membentuk solidaritas politik juga memiliki implikasi negatif. Ia berpotensi memperkuat eksklusivitas politik, di mana kandidat dari kelompok minoritas tidak memiliki peluang yang sama karena tidak memiliki jaringan sosial yang sekuat kelompok dominan. Hal ini memperbesar kesenjangan representasi politik antar kelompok etnis, sebagaimana dialami oleh kelompok etnis Sumba yang tidak memperoleh kursi meski mengajukan 15 caleg.

Dengan demikian, politik identitas sebagai bentuk solidaritas politik merupakan fenomena yang nyata dan dominan dalam Pemilu 2024 di Kota Kupang. Meskipun dapat memperkuat partisipasi politik dalam kelompok, praktik ini juga memunculkan tantangan serius terhadap inklusivitas dan pemerataan representasi dalam sistem demokrasi lokal.

3.2. Faktor Penyebab Politik Identitas Pada Pemilihan Anggota DPRD di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya politik identitas dalam pemilihan anggota DPRD di Kota Kupang tahun 2024. Faktor-faktor ini bersifat struktural, kultural, dan strategis, serta saling memengaruhi satu sama lain. Berikut ini adalah pembahasan secara rinci:

1. Kuatnya Ikatan Sosial Budaya Berbasis Etnis dan Marga Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah multietnis, dengan etnis dominan seperti Rote, Sabu, Timor, Flores, Sumba, dan pendatang (Bugis, Jawa, dll). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan adat istiadat yang melekat pada struktur marga dan suku. Sistem sosial masyarakat yang masih berakar pada budaya komunal memperkuat praktik politik identitas, karena pemilih merasa lebih percaya jika diwakili oleh individu dari kelompoknya sendiri.
2. Solidaritas Komunal dan Loyalitas Primordial Solidaritas internal marga berperan besar dalam memobilisasi suara. Dalam Pemilu 2024, pertemuan keluarga besar, forum adat, dan ikatan emosional antaranggota marga digunakan sebagai sarana kampanye. Pemilih cenderung memilih berdasarkan kedekatan emosional, bukan rasionalitas program. Hal ini terlihat dari dominasi keterpilihan caleg dari etnis Rote (33,3%), Sabu (25,7%), dan Timor (21,6%)—yang memiliki basis kekerabatan kuat.
3. Strategi Kandidat dan Tim Sukses dalam Membangun Citra Identitas Para kandidat secara sadar menggunakan strategi politik identitas dengan menonjolkan asal-usul

etnis, marga, dan keterikatan budaya. Narasi "putra daerah" atau "wakil marga" digunakan untuk memperkuat legitimasi di hadapan pemilih. Dalam banyak kasus, tim sukses bahkan membentuk jaringan kampanye berdasarkan klan atau kepala marga. Praktik ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya muncul secara alami, tetapi juga dimanfaatkan secara strategis untuk tujuan electoral.

4. Rendahnya Literasi Politik Masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program, visi, dan rekam jejak calon menyebabkan pemilih lebih mudah terpengaruh oleh simbol-simbol identitas. Sebagian besar pemilih tidak memiliki akses atau informasi yang cukup untuk menilai kualitas kandidat secara objektif, sehingga memilih berdasarkan kesamaan etnis dianggap sebagai jalan aman.
5. Minimnya Pengawasan dan Regulasi atas Kampanye Identitas Lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menyebabkan kampanye berbasis isu identitas terus berlangsung tanpa sanksi yang tegas. Praktik-praktik kampanye yang menggunakan simbol-simbol adat atau komunitas lokal untuk kepentingan politik tidak diatur secara tegas dalam regulasi pemilu, sehingga membuka ruang luas bagi politisasi identitas (Lopo, 2024).
6. Ketimpangan Representasi dan Keterbatasan Akses Politik bagi Kelompok Minoritas Kelompok etnis minoritas seperti Sumba dan Flores memiliki keterwakilan yang lebih kecil dibandingkan kelompok mayoritas. Dalam Pemilu 2024, etnis Sumba bahkan tidak berhasil memperoleh satu kursi pun meskipun mengajukan 15 calon. Hal ini menandakan bahwa dominasi kelompok mayoritas mempersempit ruang kompetisi politik yang adil, sehingga kelompok kecil terpinggirkan karena tidak memiliki basis kekuatan sosial yang cukup.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa politik identitas di Kota Kupang bukan hanya merupakan hasil dari budaya lokal yang kuat, tetapi juga merupakan strategi politik yang difasilitasi oleh kelemahan sistem pemilu dan minimnya pendidikan politik. Oleh karena itu, intervensi melalui edukasi politik, penguatan regulasi kampanye, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemilu menjadi penting untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan rasional.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran signifikan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang tahun 2024. Identitas marga dan etnis terbukti menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar pemilih dalam menentukan pilihan politik. Hal ini terlihat dari pola keterpilihan calon legislatif yang didominasi oleh kelompok etnis mayoritas lokal, seperti Rote, Sabu, dan Timor, yang memiliki ikatan sosial dan budaya kuat di tengah masyarakat. Penelitian juga mengungkap bahwa politik identitas tidak hanya tumbuh secara alamiah dari tradisi dan kedekatan sosial, tetapi juga dibentuk dan dimanfaatkan secara strategis oleh para aktor politik. Para kandidat dan tim sukses secara sadar menggunakan narasi identitas untuk membangun kedekatan emosional, memobilisasi dukungan, dan meningkatkan elektabilitas, terutama dalam komunitas berbasis marga. Praktik ini menunjukkan bahwa politik identitas beroperasi dalam dua dimensi sekaligus: sebagai ekspresi kultural dan sebagai strategi politik yang rasional. Selain itu, rendahnya literasi politik dan belum optimalnya regulasi serta pengawasan kampanye menjadi faktor pendukung yang memungkinkan politik identitas berkembang tanpa kontrol yang memadai. Temuan ini menegaskan perlunya pendidikan politik yang lebih progresif dan regulasi pemilu yang lebih tegas agar proses demokrasi lokal dapat berjalan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kualitas kandidat, bukan semata-mata faktor identitas.

Penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Mietzner, 2020), yang menyatakan bahwa politik identitas di Indonesia sering kali digunakan sebagai strategi populis untuk memperoleh dukungan dalam pemilu, terutama di tingkat lokal. Fenomena ini juga diamati oleh (Tapsell, 2018), yang menemukan bahwa simbolisme identitas dan afiliasi etnis digunakan secara sistematis oleh elite politik untuk membentuk persepsi dan loyalitas pemilih, terutama di wilayah dengan struktur sosial kompleks. Dalam konteks serupa, Surya dan (Puansah, Pulungan, & Sahbana, 2024), dosen IPDN, menyoroti bahwa praktik politik identitas dalam pemilihan kepala daerah sering kali diperkuat oleh lemahnya pendidikan politik dan minimnya regulasi pengawasan kampanye. Mereka merekomendasikan pentingnya intervensi kebijakan dalam bentuk regulasi pemilu yang lebih tegas dan program literasi politik berbasis komunitas.

Menekankan bahwa dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, praktik clientelism sering kali tumpang tindih dengan politik identitas. Hal ini menciptakan struktur relasi kuasa yang mengandalkan kedekatan etnis dan patronase sebagai alat distribusi sumber daya politik. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat literatur yang ada bahwa politik identitas di Indonesia tidak hanya merupakan produk budaya lokal, tetapi juga bagian dari strategi politik yang rasional, terstruktur, dan sering kali dimanipulasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas memiliki peran yang signifikan dalam proses pemilihan anggota DPRD tahun 2024 di Kota Kupang. Identitas berbasis marga dan etnis menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Hal ini didorong oleh kuatnya ikatan sosial dan budaya lokal, serta dimanfaatkan secara strategis oleh para calon legislatif untuk memperoleh dukungan elektoral. Politik identitas tidak hanya muncul sebagai ekspresi kedekatan kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik yang efektif dalam membangun solidaritas dan memobilisasi suara. **Keterbatasan Penelitian.** Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada konteks geografis Kota Kupang sehingga hasilnya tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda. Kedua, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif deskriptif, sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh faktor identitas dibandingkan faktor lain seperti program kerja atau kualitas personal calon. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk arah penelitian di masa depan, disarankan agar dilakukan studi komparatif di beberapa daerah lain yang memiliki keragaman etnis serupa guna melihat pola politik identitas secara lebih luas. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis keterkaitan antara identitas, persepsi pemilih, dan hasil pemilu secara lebih sistematis. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang politik identitas dapat semakin mendalam dan bermanfaat dalam membangun sistem demokrasi lokal yang lebih sehat dan inklusif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan kepada Dinas terkait dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan fasilitasi selama proses penelitian ini berlangsung. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran pengumpulan data serta pelaksanaan studi ini. Semoga hubungan baik ini terus terjalin demi kemajuan bersama.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prima Sahala. (2018). Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 240–254. <https://eprints.untirta.ac.id/947/1/Naskah%201.pdf>
- Athahirah, A. U. (2022). The Improvement Strategies of Political Participation for Novice Voters in Purwakarta Regency. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36776>
- Carlos Dwi Putra Marbun. (2022). Peran Politik Identitas Etnis Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Siraja Hutagalung. *II(1)*, 1–14. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10611>
- Coakley, J. (2018). ‘Primordialism’ in nationalism studies: theory or ideology?. *Nations and Nationalism*, 24: 327–347. <https://doi.org/10.1111/nana.12349>
- Crouch, C. (2025). Rethinking Political Identity. *Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing*, 322. <https://doi.org/10.4337/9781800881532>
- Hasanudin, R., Samad, M. Y., & Maya, H. B. (2023). Pemilihan Kepala Daerah (Collaborative Approaches Related To Preventing Identity Politics in Regional Head Elections). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2), 1–12. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/430>
- Ismail Nurdin & Sri Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. *Media Sahabat Cendekia*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/376/2/ISI%20BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>
- Labolo, Muhadam (2014) *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Rajawali Pers, Jakarta.. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799>
- Lopo, Y. H. L. (2024). Politik identitas: Tidak diinginkan tetapi sulit dihindari. *Victory News*. <https://www.victorynews.id/opini/33113644683/politik-identitas-tidak-diinginkan-tetapi-sulit-dihindari>
- M.San Opara. (2023). Analisis Kemenangan Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kota Jambi. *13(1)*, 104–116. <https://repository.unja.ac.id/45441/>
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Pierre L. Van Den Bergh. (1981). *The Ethnic Phenomenon*. London: Greenwood Publishing Group. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c6fc41f1a22f352b7fe6967c253c6230c3222ec49e3d15f8d22a7362f9196697JmltdHM9MTc0NzY5OTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=06d3cf1e-ed48-66c3-0f0f-dbdeec1e67f6&psq=The+Ethnic+Phenomenon.+London%3a+Greenwood+Publishing+Group.&u=a1aHR0cHM6Ly9hcmNoaXZILm9yZy9kZXRhaWxzL2V0aG5pY3BoZW5vbWVub24wMHZhbmq&ntb=1>
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>
- Tapsell, R. (2018). Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon.” *Indonesia*, 99(1), 29–50. <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0004>
- Manik, Toni. (2023). Penggunaan Politik Identitas Marga Bancin dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, *13(1)*, 104–116. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21004/1/1606016008_Toni_Manik_Full_Skripsi_-_97-Toni_Manik.pdf

Yatsenko, N. (2020). Political Identity: Conceptualization of the Term. *Journal Evropsky Politicky a Pravni Diskurz*, 7(6), 130–135. <https://doi.org/10.46340/eppd.2020.7.6.15>

